



Hk. 09.01/179

R

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 315 /M.PPN/11/2002**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI WISATA BAHARI**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa kondisi industri-industri maritim, khususnya wisata bahari saat ini masih belum berkembang, sedangkan potensinya sangat besar baik bagi pertumbuhan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional dan daerah, maupun bagi pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk memberikan analisis yang komprehensif dan merumuskan alternatif kebijakan pembangunan wisata bahari secara intersektoral dan terpadu, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja analisis kebijakan pembangunan industri wisata bahari;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KELOMPOK KERJA ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI WISATA BAHARI.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Analisis Kebijakan Pembangunan Industri Wisata Bahari yang untuk selanjutnya disebut Kelompok Kerja, yang terdiri dari:
a. Pengarah;
b. Pelaksana;
dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja bertugas :
a. Merumuskan kebijakan nasional untuk mengembangkan wisata bahari, antara lain yang berkaitan dengan:
a.1. Persetujuan Kapal Pesiar Memasuki Wilayah Indonesia (Cruising Approval for Indonesian Territory/CAIT);
a.2. Kepabeanan, Keimigrasian, Karantina (Custom, Immigration, Quarantine, Port Clearance/CIQP);
a.3. Keamanan;
a.4. Kerjasama Antar Daerah;
a.5. Pengembangan Kapasitas;
b. Merumuskan strategi pengembangan wisata bahari pada wilayah-wilayah maritim tertentu, antara lain:
b.1. Sumatera bagian Utara-Barat;
b.2. Riau Kepulauan, Bangka Belitung, Banten;
b.3. Nusa Tenggara;

b.4 Maluku ...

b.4. Maluku dan Papua;

b.5. Teluk Tomini;

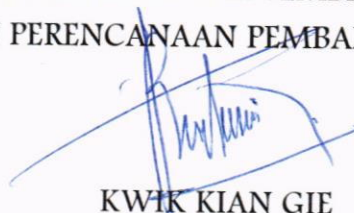
- KELIMA : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang tembusannya disampaikan kepada Inspektur Utama Bappenas;
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya Kelompok Kerja dapat dibantu oleh Sekretariat Pelaksana dan nara sumber yang kompeten yang akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Ketua Pelaksana;
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 November 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

wa



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Pertahanan;
5. Kantor Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata;
6. Direktur Jenderal Anggaran;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Kepala KPKN Jakarta III;
9. Inspektur Utama, Bappenas;
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 315 /M.PPN/11/2002
TANGGAL : 25 November 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI WISATA BAHARI

a. Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Soekarno Wirokartono	Ketua	Deputi Bidang Ekonomi Kantor Meneg. PPN/Bappenas
2.	Dr. Ir. H. Koensatwanto Inpasihardjo, Dipl. HE, M.Sc	Anggota	Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas
3.	Prof. Dr. Ir. Bambang Bintoro Soedjito, MRP	Anggota	Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional Kantor Meneg. PPN/Bappenas
4.	Drs. A. Anshari Ritonga	Anggota	Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan
5.	Drs. R. Sarwono	Anggota	Deputi Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, Kantor Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Dr. Myra Puspasari, M.Si	Anggota	Deputi Bidang Sumberdaya & Promosi Pariwisata, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Drs. Seman Widjojo, M.Si	Anggota	Dirjen Bangda, Departemen Dalam Negeri
8.	Dr. Tjuk Sukardiman, M.Sc	Anggota	Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan

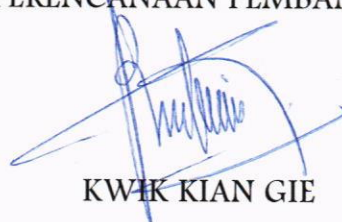
NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
9.	Laksda TNI Bambang Murgianto	Anggota	Dirjen. Potensi Pertahanan, Departemen Pertahanan
10.	Drs. M. Iman Santoso, SH, MA	Anggota	Dirjen. Imigrasi, Departemen Kehakiman dan HAM
11	Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc	Anggota	Staf Ahli Meneg. PPN Bidang Maritim dan Tata Ruang

b. Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc	Ketua merangkap Anggota	Staf Ahli Meneg. PPN Bidang Maritim dan Tata Ruang
2.	Dr. Ir. Luky Eko Wuryanto, M.Sc	Sekretaris I merangkap Anggota	Direktur Industri, Perdagangan, dan Pariwisata, Kantor Meneg. PPN/ Bappenas
3.	Ir. Tatag Wiranto, MURP	Sekretaris II merangkap Anggota	Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Kantor Meneg. PPN/ Bappenas

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,




KWIEK KIAN GIE